

Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Suatu Negara

Khairun Nisak¹, Safrur Riza², Amiruddin³

¹⁻²Student Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

³Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: 21170097@iaialaziziyah.ac.id,¹ 22170020@iaialaziziyah.ac.id²
amiruddin@iaialaziziyah.ac.id³

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that hinders development and threatens the stability of a country. Efforts to eradicate corruption require effective steps, one of which is increasing the transparency of state finances. Financial transparency involves providing open, clear and easily accessible information about a country's income, expenditure and assets to the public. This article aims to explain the importance of state financial transparency in increasing integrity and minimizing corruption in a country. By conducting a literature review and qualitative review using library research as a way to collect data, this article describes the positive impact of financial transparency in fighting corruption in a country. The results of this study indicate that countries that implement a high level of financial transparency tend to have lower levels of corruption. Financial transparency provides tools for civil society, media and oversight institutions to monitor state financial management and detect potential acts of corruption. In addition, transparency also increases the accountability and integrity of public institutions, and builds public trust in the government. Several countries still face challenges in developing effective financial reporting systems, collecting accurate data, and providing training to relevant government staff. In addition, resistance from parties involved in corrupt practices can also be a barrier. This journal concludes that state financial transparency has an important role in increasing integrity and minimizing corruption in a country. To achieve this, collaborative efforts are needed between the government, supervisory agencies, civil society, and the private sector in strengthening the financial transparency system. Increasing public awareness about the importance of transparency and active participation of the public in overseeing the use of the state budget is also an important factor.

Keywords: Transparency of State Finances, Integrity, Corruption, Accountability, Civil Society

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan mengancam stabilitas suatu negara. Upaya untuk memberantas korupsi memerlukan langkah-langkah efektif, salah satunya adalah meningkatkan

transparansi keuangan negara. Transparansi keuangan melibatkan penyediaan informasi yang terbuka, jelas, dan mudah diakses tentang pendapatan, pengeluaran, dan aset negara kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya transparansi keuangan negara dalam meningkatkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi di suatu negara. Dengan melakukan tinjauan literatur dan kajian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai cara untuk mengumpulkan data, artikel ini menggambarkan dampak positif transparansi keuangan dalam melawan korupsi di suatu negara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara yang menerapkan tingkat transparansi keuangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Transparansi keuangan memberikan alat bagi masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas untuk memantau pengelolaan keuangan negara dan mendeteksi potensi tindak pidana korupsi. Selain itu, transparansi juga meningkatkan akuntabilitas dan integritas lembaga-lembaga publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa negara masih menghadapi kendala dalam mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang efektif, mengumpulkan data yang akurat, dan memberikan pelatihan kepada staf pemerintah terkait. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi juga dapat menjadi penghalang. Jurnal ini menyimpulkan bahwa transparansi keuangan negara memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi di suatu negara. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memperkuat sistem transparansi keuangan. Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara juga merupakan faktor penting.

Kata Kunci: Transparansi Keuangan Negara, Integritas, Tindak Pidana Korupsi, Akuntabilitas, Masyarakat Sipil

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan aset atau dana negara yang sangat merugikan, baik merugikan masyarakat maupun negara. Dengan meluapnya tindakan korupsi di suatu negara maka integritas dan perekonomian negara akan menurun secara drastis. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan transparansi keuangan negara sebagai prinsip dalam suatu negara dengan tujuan meningkatkan integritas dan melawan tindak pidana korupsi. Transparansi keuangan ini melibatkan penyediaan laporan dan informasi keuangan negara kepada masyarakat secara publik, dengan tujuan mempertanggungjawabkan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan anggaran yang diperoleh di negara tersebut. Transparansi keuangan negara adalah prinsip yang sangat penting dalam membangun integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi. Keuangan negara yang transparan menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab

yang tinggi. Ini berarti bahwa sumber daya publik yang dikelola oleh pemerintah akan digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Integritas merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang baik. Transparansi keuangan negara merupakan elemen penting dalam memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan mempublikasikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara, serta proses penganggaran, negara menunjukkan komitmen untuk menjalankan roda pemerintahan atau kepemimpinan yang jujur, bertanggung jawab serta adil kepada seluruh masyarakat di suatu negara.¹

Pentingnya transparansi keuangan negara terkait erat dengan upaya meminimalisir tindak pidana korupsi. Salah satu dampak terbesar dari adanya korupsi di suatu negara yaitu menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan dapat menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghancurkan prinsip keadilan sosial. Dengan adanya transparansi keuangan negara, tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diungkap secara lebih efektif. Memberikan informasi terbuka dan dapat diakses kepada publik tentang penggunaan dana publik memberikan peluang bagi masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk memantau dan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara.² Hal ini menciptakan mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Selain itu, transparansi keuangan negara juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai keuangan negara dan melihat bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, mereka akan merasa yakin bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan mereka dan pembangunan negara secara keseluruhan. Ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pentingnya transparansi keuangan negara dalam meningkatkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi tidak dapat diabaikan. Dengan menerapkan prinsip transparansi keuangan yang kuat, pemerintah dapat membangun sistem yang akuntabel, menjalankan pemerintahan yang jujur, dan melindungi kepentingan masyarakat. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas diperlukan untuk memastikan bahwa transparansi keuangan negara menjadi prioritas yang utama dalam menjaga integritas dan mengurangi tindak pidana korupsi.

¹ Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1(2), 173-183

² Vishny, R. W, *The Quality of Government, The Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1), 1999, h. 222-279.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berusaha untuk menjelaskan seberapa pentingnya prinsip transparansi keuangan negara dalam meningkatkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi, menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseach*) dengan tinjauan literatur dan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari berbagai referensi buku, artikel, jurnal internasional dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik mengenai pentingnya prinsip transparansi keuangan negara dalam meningkatkan integritas dan meminimalisir tindak pidana korupsi.

Peneliti melakukan pencarian secara sistematis melalui basis data akademik, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lain yang terpercaya guna mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Setelah literatur-literatur terkait ditemukan, peneliti kemudian melakukan evaluasi, analisis, dan sintesis terhadap isi dari literatur tersebut.

Data yang dihasilkan melalui metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendukung berbagai macam argumen serta teori-teori yang penulis hadirkan dalam artikel ini. Analisis dalam artikel ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah berbagai sumber dari literatur yang telah dikaji. Sehingga peneliti dapat memperoleh hasil data yang bersangkutan paut dan sesuai terhadap apa yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Transparansi dalam Meningkatkan Integritas Negara

Prinsip transparansi sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi karena ia menjadi pondasi yang mendasar. Transparansi adalah langkah pertama dalam pemberantasan korupsi karena transparansi memungkinkan semua jenis penyimpangan terungkap dan diketahui publik. Oleh karena itu, transparansi berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efisien, memungkinkan masyarakat umum untuk mengawasi dan menilai tindakan pemerintah.³ Transparansi, dalam arti yang paling mendasar, mengacu pada keterbukaan dan kejujuran dalam pengembangan rasa saling percaya karena kualitas ini berfungsi sebagai titik awal yang signifikan bagi siswa dalam memenuhi kewajiban mereka sekarang dan di masa depan.⁴

Prinsip transparansi keuangan negara adalah suatu pendekatan yang mendorong pemerintah untuk mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Dengan mengikuti prinsip ini, negara bertujuan untuk menciptakan

³ Brinkerhoff, D. W, *Public sector management reforms in developing countries: Paradoxes and practices*, Public Administration and Development, 2009, 29(1), h. 1-17.

⁴ Kurniawan, *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, 2003, h. 56.

tata kelola yang lebih baik, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas sistem keuangan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prinsip transparansi dapat memberikan beberapa dampak positif, yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas

Transparansi keuangan negara dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka, pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran dan penggunaan dana publik. Ini dapat mengurangi risiko korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemborosan.⁵

2. Meningkatkan Partisipasi Publik

Transparansi keuangan negara juga dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses, masyarakat dapat memahami alokasi anggaran dan prioritas pemerintah. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih baik dan memantau penggunaan dana publik.

3. Mengurangi Ketidakadilan

Penelitian telah menunjukkan bahwa transparansi keuangan negara dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Dengan mengungkapkan informasi keuangan yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.

4. Membangun Kepercayaan

Transparansi keuangan negara dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka, pemerintah menunjukkan komitmen mereka untuk bertindak secara jujur dan terbuka. Ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi institusi negara.

Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi dengan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada keselarasan antara peraturan dan pelaksanaan tugas. Setiap organisasi bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam bentuk kebiasaan yang diterima secara umum (*de facto*) maupun dalam undang-undang (*de jure*), baik dalam hubungan perseorangan maupun dalam konteks organisasi. Organisasi

⁵ Ebrahim, A, *Making Transparency Transparent: The Evolution of Observation in Management Theory*. *Academy of Management Review*, 2003, 28(4), h. 521-540.

-organisasi tersebut memiliki peran dalam berbagai bidang seperti berbasis bisnis, publik, masyarakat, dan juga dalam hubungan antara ketiga bidang tersebut.⁶

Secara tradisional, ide akuntabilitas publik telah dilihat sebagai cara untuk memantau dan mengatur aktivitas administratif dengan memaksa orang atau organisasi tertentu untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka atau bertanggung jawab kepada berbagai otoritas eksternal.⁷ Selain itu, pada tingkat paling mendasar, akuntabilitas publik merujuk pada kemampuan individu atau entitas untuk memberikan tanggapan terkait dengan kinerja yang diharapkan kepada pihak yang relevan. Pihak yang menerima tanggapan tersebut harus memiliki wewenang yang sah untuk melakukan pengawasan dan memiliki harapan terhadap pencapaian kinerja yang diharapkan.⁸

Beberapa aspek dari metode akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hasil, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Dalam praktiknya, akuntabilitas harus dapat diukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan didasarkan pada prosedur pelaporan serta tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas publik juga melibatkan penilaian kinerja administratif, pelaksanaan prosedur, dampak, serta manfaat jangka panjang yang diperoleh oleh masyarakat.⁹

Prinsip akuntabilitas menekankan pada transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa para pelaku korupsi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan agar proses pemerintahan menjadi lebih terbuka dan dipantau dengan baik.

Peran Masyarakat Sipil dalam Memberantas tindakan korupsi

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Melalui partisipasi aktif mereka, baik melalui pengamatan langsung, pelaporan kejadian yang mencurigakan, atau penggunaan media sosial dan teknologi informasi lainnya, masyarakat sipil dapat memberikan informasi berharga kepada lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang sedang terjadi.

Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik tentang korupsi dapat membantu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan

⁶ Dimaggio, P., & Powell, W, *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*, *American sociological review*, 1983, 48(2), h. 147-160.

⁷ Bovens, M, *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*, *European law journal*, 2007, 13(4), h. 447-468.

⁸ Pierre, Jon, *Handbook of Public Administration*, London: SAGE Publication Ltd, 2007, h. 198.

⁹ Junaid, N. & Aman, Z. *The dimensions and determinants of public sector performance: A review*. *Procedia Economics and Finance*, 2015, 28, h. 109-116.

informasi tentang konsekuensi negatif korupsi, hak-hak mereka, dan cara-cara untuk melawan korupsi melalui pendidikan publik, kampanye anti-korupsi, dan penyuluhan. Peningkatan kesadaran ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam melawan korupsi.

Peran masyarakat sipil dalam memberantas tindakan korupsi sangat penting dan memiliki dampak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil juga dapat membentuk aliansi dan kelompok advokasi untuk memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan. Melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO), LSM, media, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, mereka dapat meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah untuk memerangi korupsi. Aliansi dan kelompok advokasi ini juga dapat menyuarakan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan anti-korupsi. Melalui aksi kolektif, masyarakat sipil dapat mengubah iklim dan budaya yang memfasilitasi tindak pidana korupsi.¹⁰

Masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai penjaga dan pengawas terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Dengan menjadi mata dan telinga yang waspada, mereka dapat mendeteksi kejanggalan, penyimpangan, atau tindak pidana korupsi yang terjadi. Masyarakat sipil yang aktif dalam hal tersebut akan membantu mengurangi ruang gerak para pelaku korupsi dan memicu pemerintah untuk bertindak.

Masyarakat sipil yang aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan korupsi. Partisipasi mereka dalam memantau anggaran, mengawasi proyek, dan prosedur pengadaan dapat berkontribusi untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengaturan dana publik. Kerjasama antara masyarakat sipil, pemerintah dan pihak swasta juga dapat menghasilkan inisiatif bersama yang efektif dalam memerangi korupsi. Pentingnya peran masyarakat sipil dalam memberantas praktik korupsi telah diakui oleh berbagai organisasi internasional dan institusi pemerintah.

PENUTUP

Transparansi keuangan negara merupakan suatu prinsip yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan integritas juga berperan penting dalam meminimalisirkan tindak pidana korupsi yang timbul dalam suatu negara. Prinsip transparansi keuangan negara memberikan informasi yang aktual dan terpercaya kepada semua pihak secara keseluruhan tanpa adanya manipulasi sedikit pun. Selain itu, transparansi juga meningkatkan akuntabilitas dan integritas

¹⁰ Transparency International, *People Power: Civil Society and the Fight Against Corruption*. Retrieved from, 2019.

lembaga-lembaga publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Peran masyarakat sipil memiliki kepentingan yang signifikan dalam memerangi tindak pidana korupsi, terutama melalui fungsi pengawasan dan pelaporan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Masyarakat sipil juga memiliki kemampuan untuk membentuk lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran merupakan langkah penting. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat sipil dapat menjadi dasar untuk mengungkap dan menindak tindak pidana korupsi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat, dan harus memungkinkan untuk menantang keputusan pejabat publik. Selain itu, sangat penting untuk membuat organisasi terpisah yang tugasnya adalah memerangi korupsi. Masyarakat harus menganggap lembaga ini bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kebebasan masyarakat sipil untuk berekspresi dan kebebasan bergerak. Ini termasuk upaya untuk membuat media jurnalistik yang bebas dan mandiri.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1(2), 173–183
- Bovens, M. 2007. *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*, European law journal. 13(4).
- Brinkerhoff, D. W. 2009. *Public sector management reforms in developing countries: Paradoxes and practices*. Public Administration and Development. 29(1).
- Dimaggio, P., & Powell, W. 1983. *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. American sociological review. 48(2).
- Ebrahim, A. 2003. *Making Transparency Transparent: The Evolution of Observation in Management Theory*. Academy of Management Review, 28(4).
- Junaid, N. & Aman, Z. 2015. *The dimensions and determinants of public sector performance: A review*. Procedia Economics and Finance.
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pierre, Jon. 2007. *Handbook of Public Administration*. London: SAGE Publication Ltd.

Transparency International. 2019. People Power: Civil Society and the Fight Against Corruption. Retrieved from.

Vishny, R. W. 1999. *The Quality of Government, The Journal of Law, Economics, and Organization*.